

PENGAWASAN TRIWULAN I DPRD SOROTI

## Potensi Kebocoran Penarikan Retribusi Wisata

**WONOSARI (KR)** - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul menyoroti banyak hal atas kegiatan pemerintah dalam Tri Wulan I tahun 2024. Di bidang pariwisata terdapat potensi kebocoran penarikan retribusi wisata, sehingga perlu dilakukan peningkatan pengawasan, untuk mencegah adanya oknum yang melanggar perda retribusi dan perlu segera dilakukan e ticketing agar efektif dan efisien.

Naiknya retribusi wisata juga perlu diimbangi dengan perbaikan jalan dan sarana wisata, termasuk segera dilakukan perbaikan lampu penerangan jalan yang banyak rusak. Demikian dikatakan juru bicara DPRD Gunungkidul Arif Wibowo dalam rapat paripurna pengawasan pelaksanaan APBD tahun 2024, Selasa (30/4).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Endah Subekti Kuntariningsih SE dihadiri Bupati H Sunaryanta, para kepala organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta tamu undangan lainnya. Tidak hanya bidang pariwisata, DPRD Gunungkidul juga mengingatkan pemerintah yang belum mampu menaikkan

Indek Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia masih rendah bahkan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah masih jauh dari harapan. Terhadap kondisi ini direkomendasikan kepada eksekutif agar mendorong Dinas Pendidikan

melakukan optimalisasi kegiatan dalam peningkatan literasi masyarakat dan lama sekolah serta menguatkan kerjasama lintas OPD untuk peningkatan IPM. Demikian pula dalam bidang kesehatan, pengadaan alat kesehatan penunjang pelayanan rumah sakit perlu ditingkatkan, eksekutif agar mengambil langkah-langkah strategis dalam percepatan dan peningkatan dalam pendanaan.

Peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat terutama di UGD di RSUD Wonosari agar dilakukan penambahan jumlah tenaga kesehatan. Pemerintah bersama BPJS Kesehatan hendaknya melakukan sosialisasi pemanfaatan kartu



KR-Endar Widodo

**Endah Subekti Kuntariningsih SE menyerahkan rekomendasi pengawasan kepada Bupati.**

Indonesia sehat (KIS). Karena masih banyak yang belum memahami. Rekomendasi lain, DPRD menilai penurunan angka

kemiskinan masih rendah, perlunya peningkatan pengelolaan sampah dan sebagainya. (Ewi)

## Bawaslu Buka Pendaftaran Panwascam

**WATES(KR)**-Bawaslu Kabupaten Kulonprogo telah selesai melakukan evaluasi terhadap Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) existing yang hendak meneruskan menjadi pengawas di event Pilkada. Dari 36 Panwascam existing di Kulonprogo, tercatat 34 orang mendaftar lagi (mengumpulkan berkas persyaratan) untuk Panwascam Pilkada.

Ketua Bawaslu Kulonprogo Marwanto SSos MSI mengatakan, dari 34 Panwascam existing yang mendaftar lagi untuk menjadi pengawas Pilkada 2024, 31 orang dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan lagi sebagai Panwascam Pilkada. "Lima orang tidak memenuhi syarat, masing-



KR-Widiastuti

**Marwanto**

masing satu orang di Wates dan Panjatan karena tidak mendaftar, dan tiga orang di Nanggulan karena tidak ikut penilaian atasan langsung. Namun bagi 31 orang Panwascam existing yang memenuhi syarat, masih akan kita tunggu masuk an masyarakat sampai

tanggal 17 Mei 2024," jelas Marwanto, Kamis (2/5).

Dengan adanya lima orang yang tidak memenuhi syarat (TMS) tersebut, maka mulai hari Jumat (3/5) ini, Bawaslu Kulonprogo mengumumkan untuk membuka pendaftaran Panwascam baru bagi masyarakat umum di tiga kecamatan, yakni Wates, Panjatan dan Nanggulan. "Kebutuhan di tiap kecamatan tidak sama. Di Wates dan Panjatan kita buka satu formasi atau lowongan. Sedangkan di Nanggulan kita buka tiga lowongan. Masyarakat yang ingin mendaftar sebagai Panwascam Pilkada di tiga kecamatan tersebut ditunggu sampai tanggal 7 Mei," tandas Marwanto. (Wid)

## HARI JADI GUNUNGKIDUL Resmi Berubah Menjadi 4 Oktober

**WONOSARI (KR)** - Hari jadi (Harjad) Kabupaten Gunungkidul yang semula 27 Mei berubah menjadi 4 Oktober menyusul hasil persetujuan DPRD. Dalam sidang paripurna oleh Panitia Khusus (Pansus) III memamerkan persetujuan atas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang hari jadi tersebut.

Kepala Disbud Gunungkidul, Chairul Agus Mantara mengatakan pasca penandatanganan nota persetujuan antara DPRD dengan bupati maka hari jadi Gunungkidul telah

resmi berubah menjadi 4 Oktober.

"Kami akan merilis dan mensosialisasi dengan berbagai agenda pada Oktober mendatang," ujarnya.

Sesuai dengan laporan Pansus III DPRD dan pengkajian yang dilakukan selama tiga tahun terakhir mengenai sejarah Kabupaten Gunungkidul menjadi dasar perubahan hari jadi tersebut.

Nama Gunungkidul telah disebut sebelum kerajaan Mataram Islam berdiri pada abad 17 sekalipun belum menunjuk

pada suatu kesatuan daerah administratif; Kedua, pada tanggal 13 Februari 1755 terjadi perjanjian giyanti yang menyebabkan Mataram Islam pecah menjadi dua bagian yaitu kasunanan dan kasultanan.

Ketiga, tanggal 27 September 1830 perjanjian klaten menyepakati batas wilayah kasunanan Surakarta dan kasultanan Yogyakarta yang ditandatangani di Surakarta tanggal 12 Rabiulakhir tahun Dje (jawa) 1758 (1 Oktober 1830) dan di Yogyakarta tanggal 16 Rabiulakhir

Tahun Dje (jawa) 1758 (4 Oktober 1830).

Isi perjanjian tersebut adalah kesepakatan bahwa wilayah pajangan dan sukowati masuk wilayah Surakarta hadiningrat sedangkan Mataram dan Gunungkidul masuk wilayah Yogyakarta Hadiningrat.

"Dari kajian sejarah, penandatanganan Perjanjian Klaten di Yogyakarta pada tanggal 4 Oktober 1830 menjadi titik tolak terbentuknya Kabupaten Gunungkidul," terangnya. (Bmp)

## MENAKAR KEBERANIAN PEMKAB

### Perlunya SE Pejabat Bertempat Tinggal di KP dan Mobdin

**PENGASIH (KR)**- Setelah diterbitkan Surat Edaran (SE) Nomor : 055/0759 Tentang Gerakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Beli produk lokal Kulonprogo melalui Aplikasi Bela Beliku, sebagai upaya pemkab membunikan Bela Beli Kulonprogo, gerakan semangat pembelaan penumbuhan ekonomi lokal. Sebenarnya ada yang lebih pokok atau yang harus dibuatkan SE juga yakni berkaitan pejabat harus bertempat tinggal di Kulonprogo, dan tentang mobil dinas (mobdin) digunakan saat berdin tidak boleh dibawa pulang.

"Para pejabat yang tidak tinggal di Kulonprogo, maka otomatis belanjanya lebih banyak di luar Kulonprogo, dan tidak tahu pula tentang kese-

harian masyarakat setempat. Sedang para pejabat yang tidak bertempat tinggal di Kulonprogo menggunakan mobil maupun dinas yang dibiayai APBD justru ini harus ada perhatian Bupati," ujar Ketua Komisi IV yang juga Sekretaris Fraksi PAN DPRDKabupatenKulonprogo MuhtaromAsrori SH, Kamis (2/5).

Dikatakan Muhtarom, mengapa demikian, karena mobil dinas yang untuk nglajo itu baik BBM, oli, dan lainnya dibiayai oleh APBD, sehingga akan terjadi pemborosan. Jadi jangan setengah-setengah bila membuat kebijakan. Berani tidak bupati membuat SE berkaitan dengan penggunaan mobil dinas serta pejabat agar tinggal di Kulonprogo.

"Termasuk membuat Surat Edaran para tamu



KR-Widiastuti

**Muhtarom Asrori**

yang berkunjung di Kulonprogo untuk menginap di sini. Karena sampai hari ini ketika ada pejabat berkunjung ke Kulonprogo, menginapnya di luar," tandas Muhtarom

Menurut Muhtarom, yang tidak kalah pentingnya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha sektor Perbengkelan yang harusnya semua kendaraan dinas

baik motor dan mobil ketika rusak atau karena yang lain harusnya dibawa ke unit perbengkelan aneka usaha milik pemkab dalam rangka membesarkan usaha tersebut. Tapi hanya sebagian kecil saja yang masuk ke sana, mayoritas menggunakan bengkel di luar aneka usaha.

"Ternyata ketika ini dilakukan tidak ada sangsi apa-apa. Katanya bela beli, di mana letak bela belinya ketika pemkab punya bengkel yang digawangi BUMD Aneka usaha, tapi justru tidak dimanfaatkan dan malah menggunakan bengkel di luar. Kalau pejabat pemkab saja tidak percaya apalagi masyarakat. Padahal itu juga bagian dari bela beli dan menguatkan serta memperbesar usaha BUMD," ujar Muhtarom. (Wid)

## KAMPUNG SIAGA BENCANA DIKUKUHKAN BUPATI

### Antisipasi Kerawanan Bencana Alam

**WONOSARI (KR)** - Bupati Gunungkidul H Sunaryanta mengukuhkan pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) Kalurahan Ngeposari, Semanu, Gunungkidul. Wilayah ini memiliki kerawanan bencana angin kencang karena berada di wilayah perbukitan.

Pengukuhan KSB diawali dengan simulasi bencana angin kencang, diilustrasikan terjadi bencana angin uang menyebabkan banyak pohon tumbang menutup akses jalan dan banyak korban berjatuhan.

"Pembentukan KSB ini sebagai wujud menyadarkan masyarakat dalam menghadapi bencana," kata H Sunaryanta, di kom-



KR-Istinewa

**Bupati Gunungkidul menyaksikan simulasi bencana alam di Semanu.**

pleks Embung Jamprong, Semanu.

Kabupaten Gunungkidul memiliki banyak potensi bencana mulai dari kekeringan, angin kencang, banjir hingga tanah longsor sehingga pembentukan KSB ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap kesiagaan

dari resiko ancaman bencana dan pengurangan resiko.

Mitigasi bencana sangat penting dari perubahan pola penanganan bencana yang tidak hanya cepat tapi juga ada langkah preventif.

"Semoga pembentukan KSB dapat memberikan

kemanfaatan yang optimal," ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsi mengatakan, pembentukan Kampung Siaga Bencana diharapkan dapat mendorong peran serta masyarakat di wilayah yang memiliki potensi rawan.

Kesiapsiagaan memiliki arti penting dalam meminimalkan korban. Pembentukan KSB melibatkan 60 personel dari unsur masyarakat dan kalurahan Ngeposari. Mereka mendapatkan pelatihan mulai Tanggal 28-30 April 2024. "Kegiatan ini bersumber dari APBN Kemensos dan lumbung sosial berjumlah Rp. 245 juta," paparnya. (Bmp/Ded)

## SUKAMTA PULANG KAMPUNG Siap Maju Pilkada Kulonprogo

**PENGASIH (KR)** - Kabupaten Kulonprogo punya masa depan luar biasa. Di Selatan ada Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) dan di Utara terdapat Candi Borobudur. Negara menciptakan dua fasilitas tersebut sangat luar biasa dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dan kemajuan pembangunan wilayah kabupaten ini.

"Borobudur dan YIA mesin generator ekonomi daerah. Sehingga saya tertarik agar dua generator tersebut bisa menyalaikan Kulonprogo menjadi lebih terang dan maju. Dua generator ekonomi kita itu seharusnya memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang mampu mengakselerasi kemajuan Kabupaten Kulonprogo," kata Bupati Tanah Laut Provinsi Kalsel periode 2018-2023, Drs Sukamta yang berniat maju dalam kontestasi Pilkada Kulonprogo 2024, Selasa (30/4).

Generator besar tersebut



KR-Asrul Sani

**Drs H Sukamta**

akan menimbulkan multiplier effect yang bisa merata di wilayah Utara Selatan. Kalau generator Utara bisa dimainkan di Kapanewon Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo dan di Selatan juga demikian maka kita tinggal melakukan kanalisasi transportasi. Ketika nyambung pasti akan menghasilkan daya ungkit ekonomi yang besar.

"Itu sesungguhnya yang melatarbelakangi saya tertarik ikut maju sebagai cabup Kulonprogo dalam Pilkada 2024. Jadi kesempatan saya memang sekarang untuk melakukan hal-

hal besar, saya sadar kalau kelak saya dipercaya masyarakat jadi bupati maka dalam lima tahun tidak akan bisa menyelesaikannya. Tapi paling tidak saya sudah meletakkan pondasinya," jelas pria kelahiran Pedukuhan Semen Kalurahan Sukoreno, Sentolo, Kulonprogo.

Sukamta punya cita-cita tinggi. Dengan latar belakang sekolah di pemerintahan dan dididik jadi demokratis yang tugasnya memberikan pelayanan pada masyarakat diyakini bisa menyejahterakan masyarakat dan memajukan pembangunan kabupaten ini. "Kepuasan tertinggi dari apa yang kita lakukan bisa berbakti bagi Nusa dan Bangsa wabil khusus tanah kelahiran. Karena itu saya pulang ke Kulonprogo. Menantang lho ini dan saya punya tagline Kulonprogo Bangkit Gungregah untuk Maju dalam menjawab tantangan memajukan Kulonprogo," ujarnya. (Rul)

## KPU KULONPROGO BERI 3 HARI PERPANJANGAN Perekrutan PPK Khusus Kapanewon Girimulyo

**WATES (KR)** - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo memberikan waktu tiga hari perpanjangan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) khusus Kapanewon Girimulyo.

"Hal ini terjadi karena di wilayah tersebut pelamar yang mendaftar kurang dari dua kali kebutuhan. Jumlah pendaftar di Girimulyo baru 8 orang, kurang 10 orang. Pendaftaran perpanjangan ini terhitung selama tiga hari. Adapun jadwalnya dimulai tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 2024," kata Aris Zurkhasanah Anggota KPU Kulonprogo yang merupakan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Selasa (30/4).

Dijelaskan, hal ini mendasar berdasarkan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022, dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang

mendaftar atau kurang dari dua kali jumlah PPK dan PPS yang dibutuhkan, maka KPU Kabupaten/Kota membuka satu kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 hari. "Dan apabila jumlah pendaftar tidak juga memenuhi ketentuan, maka proses seleksi tetap dilaksanakan," ujar Zurkhasanah.

Adapun persyaratan untuk menjadi PPK adalah warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 tahun, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, komitmen dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Proklamasi, memiliki integritas, serta tidak menjadi anggota partai politik setidaknya selama lima tahun terakhir, berdomisil di wilayah mendaftar, sehat secara jasmani dan rohani, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.

"Untuk lebih jelasnya para pelamar bisa mengklik tautan <https://siakba.kpu.go.id/>," ucap Zurkhasanah. (Wid)